

**IMPLEMENTASI *SCHOOL BASED MANAGEMENT* DAN  
PARTISIPASI KOMITE SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN  
MUTU PENDIDIKAN DI SD NEGERI 1 JAMPIROSO  
KABUPATEN TEMANGGUNG**

*IMPLEMENTATION OF SCHOOL BASED MANAGEMENT AND PARTICIPATION OF  
THE SCHOOL COMMITTEE IN IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION  
AT SD NEGERI 1 JAMPIROSO TEMANGGUNG REGENCY*



Oleh :

**Rina Purwantini**  
**18.0406.0006**

**TESIS**

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Magister Pendidikan (M. Pd)  
Program Pendidikan Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**Tahun 2022**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dunia pendidikan harus mendapat perhatian khusus, hal ini karena pendidikan harus dapat dijadikan sebagai alat atau tujuan dalam perjuangan mencapai cita-cita bangsa yang dinamis. Oleh karena itu setiap program pendidikan harus diusahakan secara dasar dan maksimal dalam rangka pengembangan kepribadian, menanamkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan peserta didik. Sekolah sebagai pelaku pendidikan merupakan sarana bagi masyarakat dalam melakukan proses belajar aktif secara struktural. Sekolah menjamin transfer ilmu antara guru dengan murid dapat berjalan dengan lancar. Sekolah juga merupakan organisasi pendidikan yang berada dan paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, antara sekolah dengan masyarakat semestinya memiliki peran kerjasama untuk bisa memajukan pendidikan di lingkungan dimana sekolah itu berada.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pemerintah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan dapat menghasilkan warga Negara yang taqwa, cerdas, terampil juga sehat jasmani dan rohani, sebagaimana tercantum dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.

Berdasarkan masalah ini, maka berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Dari berbagai pengamatan dan analisis, menurut Mulyasa (2013, hal. 159) sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata, yaitu:

1. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education function atau *input-output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*) secara

otomatis akan terjadi. Tetapi dalam kenyataan mutu pendidikan yang kita harapkan tidak terjadi. Itu semua kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

2. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengankondisi sekolah setempat.
3. Peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedangkan dukungan-dukkungan lain seperti pemikiran, moral dan barang/jasa kurang diperhatikan.

Berdasarkan kenyataan di atas, maka perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Salah satunya yaitu, sekolah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak (keluarga, masyarakat) untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai program pendidikan. Dalam pelaksanaanya, peran serta dan dukungan masyarakat baik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sangat dibutuhkan.

Keberadaan komite sekolah ini telah mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat

perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Menurut keputusan Mendiknas, komite sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di aturan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Hasbullah (2015, hal. 89) berpendapat bahwa dalam penamaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, majlis madrasah, majelis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang telah disepakati bersama.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekedar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada *action* di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian Tutik Rusmawati (2020, hal. 15) menyatakan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan, partisipasi masyarakat dan komite sangat berpengaruh, masyarakat dan komite bukan hanya berperan dalam membantu masalah finansial sekolah, akan tetapi memberikan dorongan, pendapat dan saran untuk tujuan peningkatan mutu.

Dari berbagai pengalaman dan kenyataan-kenyataan di lapangan, ternyata dalam pelaksanaan konsep komite tidak mudah. Kesulitannya bukan pada tataran konsep komite yang tidak jelas, tetapi keberadaan komite sekolah belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masih adanya paham masyarakat terhadap pola lama dimana seluruh program selalu bersifat dari atas ke bawah tidak menghiraukan keinginan dari masyarakat sekitarnya. Sering kali terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas guru dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki. Masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab, padahal merupakan milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama yang harus dipikul bersama-sama. Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Mendiknas tentang Komite Sekolah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya.

Berkaitan dengan peran dan fungsinya sebagai mitra penyelenggaraan pendidikan, maka perlu adanya manajemen komite sekolah agar dalam kemitraan bisa menempatkan tugas pokok dan fungsinya, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Komite sekolah diharapkan tidak sekedar hanya papan nama, pelengkap organisasi, atau hanya sebagai alat pengumpul dana dari masyarakat.

Sebagai langkah terciptanya pengelolaan pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik maka diperlukan sistem manajemen yang baik yang melibatkan Pemerintah,

Sekolah, dan masyarakat melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Menurut Muhamad Churdaini (2020, hal. 20-21) salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dalam praktiknya lebih dikenal sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). konseptual MBS atau MPMBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan. Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai elemen paling mendasar, untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan.

Menurut Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebut MBS dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Secara umum MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberi otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung seluruh warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Manajemen Berbasis Sekolah mengedepankan sistem yang otonom, transparan, akuntabel, partisipatif dan kerjasama. Tujuannya adalah untuk membentuk sekolah yang mampu mengembangkan dirinya sendiri dengan caranya sendiri sesuai dengan karakter sekolah namun dapat dipertanggungjawabkan terhadap negara dan masyarakat. Untuk memperoleh

kerjasama yang kuat dan saling menguntungkan kedua pihak, peran sekolah untuk membentuk kepercayaan bahwa masyarakat merupakan bagian dari sekolah .

Berdasarkan hasil observasi pendahuluan di SDN 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung memberikan gambaran bahwa Pelaksanaan MBS terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip MBS belum dapat dijalankan secara sepenuhnya serta peran komite sekolah juga masih terdapat kendala walaupun komite telah berusaha untuk dapat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan di lembaga ini. Dibuktikan dengan keterlibatan Komite Sekolah di setiap pelaksanaan program kerja sekolah dan hasil prestasi baik perstasi secara akademik maupun non akademik. Komite Sekolah selalu memberikan dukungan baik yang berupa tenaga, pemikiran maupun material. Komite sekolah di lembaga ini dalam pembentukannya telah melalui proses dengan menggunakan prinsip transparan dan demokratis. Dalam mendukung tercapainya visi dan misi sekolah komite membantu dalam mitra kerja dan juga ikut dalam pelaksanaan program sekolah. Ada dua dukungan yaitu dukungan moral dan finansial. Dukungan moral meliputi pemantauan belajar siswa, mendukung kegiatan KBM, dan juga mendukung adanya kegiatan doa bersama yang dikhususkan untuk kelas enam, kegiatan sholat dhuhur berjamaah,santapan rohani bagi siswa dan guru, kegiatan keagamaan terutama agama islam seperti adanya kegiatan ,sholat dhuha ekstrakurikuler bernafaskan islam seperti Rebana,murattail,kaligrafi,atau TPQ. Sedangkan

dukungan finansial meliputi memberikan sumbangan dalam sarana dan prasarana sekolah. Manajemen komite sekolah yang dilakukan berupa Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasandan evaluasi untuk semua program sekolah. Keterlibatan komite sangat diharapkan dan dibutuhkan dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekolah, yaitu antara lain mutu pendidikan dan sarana prasarana yang optimal.

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi *School Based Management* dan Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kesulitan dalam pelaksanaan tujuan komite bukan pada tatanan tujuan komite yang tidak jelas, tetapi keberadaan komite sekolah belum banyak dikenal oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena masih adanya paham masyarakat terhadap pola lama dimana seluruh program selalu bersifat dari atas ke bawah tanpa menghiraukan aspirasi dari masyarakat.
2. Terjadi kesalahpahaman bahwa pendidikan hanyalah tugas guru dan pemerintah, sedangkan masyarakat tidak pernah merasa memiliki. Masyarakat tidak pernah merasa bertanggung jawab, padahal merupakan milik bersama, kewajiban bersama dan tanggung jawab bersama yang harus dipikul bersama- sama.

3. Peran komite sekolah sebagai badan pendukung dalam mengatasi keterlambatan dan kekurangan dana sekolah untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah masih terdapat kendala.
4. Peran komite sebagai badan penghubung dalam mengkoordinasikan dana dari masyarakat khususnya orang tua murid belum tercapai maksimal.
5. Masih adanya campur tangan pemerintah dalam dalam hal pendanaan sekolah terutama Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengakibatkan prestasi sekolah belum dapat meningkat secara maksimal.

#### **C. Fokus dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi *School Based Management* di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengawas, badan penghubung dalam implementasi *School Based Management* dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?
3. Apa saja kendala implementasi implementasi *School Based Management* dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi *School Based Management* di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan partisipasi komite sekolah sebagai badan badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengawas, badan penghubung dalam implementasi *School Based Management* dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung.
3. Mendeskripsikan dan menjelaskan kendala implementasi implementasi *School Based Management* dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi mengenai tugas komite sekolah.
  - b. Memperkaya teori-teori manajemen pendidikan dalam kaitannya dengan manajemen berbasis sekolah
  - c. Sebagai bahan untuk meningkatkan pemahaman konsep peran dan partisipasi komite sekolah sesuai dengan pedoman. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dalam manajemen pendidikan khususnya

terkait dengan peran komite sekolah.

- d. Memberikan referensi dan sumbangan positif terhadap pengembangan ilmu di bidang pendidikan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pengambil Kebijakan

- 1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pengetahuan tentang manajemen sekolah salah satunya mengenai peran komite sekolah dalam lingkup manajemen sekolah.
- 2) Untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya kajian pendidikan dalam bidang Kependidikan Islam (KI).
- 3) Menambah koleksi bahan pustaka pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang yang diharapkan menjadi referensi atau bacaan bagi mahasiswa dan pihak yang berkepentingan.

### b. Bagi Praktisi Pendidikan

- 1) Untuk memberikan gambaran mengenai implementasi *School Based Management* dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung.
- 2) Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi SD Negeri 1

Jampiroso dalam meningkatkan peran dan partisipasi komite sekolah.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

- 1) Penelitian ini sebagai bahan rujukan awal peneliti selanjutnya.
- 2) Menambah khasanah keilmuan sebagai awal penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)**

##### **1. Pengertian Manajemen**

Dalam upaya mencapai mutu layanan yang ingin dicapai, setiap sekolah diharapkan mampu mengelola sebuah sistem yang memberikan kemudahan baik bagi sekolah maupun masyarakat. Sistem yang dirancang dengan sebuah pengaturan tertentu biasanya disebut dengan manajemen. Dengan menerapkan sistem tertentu maka kegiatan yang ada didalamnya merupakan bagian dari manajemen yang diterapkan disana. Dalam dunia pendidikan, manajemen erat kaitannya dengan pengaturan pelayanan pendidikan. Maka istilah manajemen biasanya sering disebut juga dengan pengelolaan, atau pengaturan.

Menurut Sulistyorini dalam Eri Susan (2019, hal. 953), manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus. Selanjutnya definisi manajemen berkembang lebih lengkap. Lauren A. Aply seperti yang dikutip Tanthowi menerjemahkan manajemen sebagai “*The art of getting done though people*” atau seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam Eri Susan (2019, hal. 953) manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen adalah suatu ilmu juga seni untuk membuat orang lain mau dan bersedia berkerja untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan bersama oleh sebab itu manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. 2 Pada hakekatnya kegiatan manusia pada umumnya adalah mengatur (managing) untuk mengatur disini diperlukan suatu seni, bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama (Sari, W., & Marlina, M., 2012, hal. 41).

Pengertian Manajemen menurut Ismail Solihin (2012, hal. 12) adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (*human resource capital*), modal (*financial capital*), material (*land, natural resources or raw materials*), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan.

Engkoswara dan Komariah (2011, hal. 85) menyatakan bahwa terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen:

- a. Manajemen sebagai kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu menekankan perhatian pada ketrampilan dan kemampuan manajerial yang dikualifikasikan menjadi kemampuan/keterampilan teknis manusiawi dan konseptual.
- b. Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen.
- c. Manajemen sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (*style*) seseorang dalam menggunakan atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.

Lebih lanjut Achmad Sanusi (2010, hal. 7) mengartikan bahwa manajemen pendidikan merupakan kegiatan mengelola berbagai sumber daya pendidikan untuk mewujudkan fungsi dan peran lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu berarti bahwa setiap komponen pendidikan akan bekerja untuk mencapai tujuan berdasarkan fungsi masing-masing demi terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Menurut Engkoswara dan Komariah (2011, hal. 87) manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber efisien untuk mencapai tujuan secara efektif.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen

adalah sistem yang mengatur dan mengelola komponen-komponen didalamnya untuk saling bekerjasama dalam mencapai tujuan. Setiap komponen dituntut untuk terlibat/ berpartisipasi dalam bentuk apapun untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan manajemen pendidikan merupakan sistem yang mengatur dan mengelola komponen-komponen pendidikan untuk dapat saling bekerjasama dalam mencapai tujuan pendidikan.

## **2. Konsep Dasar MBS**

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Seperti diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 'setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan'. Sebagai perwujudan dari undang-undang tersebut maka lahirlah istilah wajar 9 tahun, atau wajar 12 tahun. Selain memperoleh pendidikan, setiap warga juga berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang layak.

Dalam pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan, sering kita dengar istilah mengenai manajemen. Dengan menerapkan sistem tertentu maka kegiatan yang ada didalamnya merupakan bagian dari manajemen yang diterapkan disana. Dalam dunia pendidikan, manajemen erat kaitannya dengan pengaturan pelayanan pendidikan. Maka istilah manajemen biasanya sering disebut juga dengan pengelolaan, atau pengaturan.

Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati (2020, hal. 187) menyatakan

bahwa Manajemen Berbasis sekolah pertama kali bergulir sejak terjadi adanya kebijakan otonomi pada masa reformasi. Sebagai perwujudan bentuk otonomi maka, sistem pelayanan yang dulunya bersifat sentralistik berubah menjadi otonomi dan desentralistik. Sistem birokrasi yang sentralistik dianggap sebagai penyebab keterpurukan mutu pendidikan di tanah air, sebab sistem birokrasi tersentral yang menentukan pengambilan keputusan menjadi faktor penyebab menurunnya semangat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Nurkolis dalam Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati (2020, hal. 189) merumuskan bahwa MBS adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada tingkat sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Dengan adanya pemberian kewenangan tersebut maka peran sekolah akan meningkat. Bukan hanya sebagai penanggung jawab, teknik dan cara sekolah yang diterapkan untuk melaksanakan program sekolah akan menentukan perkembangan sekolah.

Demikian juga dengan Hasbullah (2015, hal. 70) menyatakan bahwa pada dasarnya MBS merupakan strategi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang menekankan pada penerahan dan pendayagunaan sumber internal sekolah dan lingkungannya secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan

yang bermutu atau berkualitas. Hal senada juga ditegaskan oleh Sagala (2011, hal. 156) bahwa konsep MBS adalah gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah dalam satu keutuhan entitas sistem untuk membuat keputusan.

Menurut Widyastuti dkk (2020, hal. 8), MBS adalah salah satu basis manajemen pengelolaan sekolah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama secara partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat di sekitarnya dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Menurut Made Saihu (2020, hal. 36) manajemen berbasis sekolah adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerintaan pendidikan.

Sedangkan menurut Hadiyanto dalam Alif Achadah (2019, hal. 81), manajemen berbasis sekolah (MBS) adalah suatu cara untuk memajukan mutu pendidikan dengan pelimpahan kebijakan pengambilan keputusan yang seyogyanya berasal dari pemerintah pusat kepada daerah masing-masing lembaga, yang hal tersebut

menjadikan kepala sekolah, guru, peserta didik, dan wali murid mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap kegiatan belajar mengajar dilembaga atau disekolah, dan yang tak kalah penting adalah bahwa sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab yang besar dalam mengambil keputusan dalam bidang keuangan dan kurikulum sekolah.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai pengertian Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah adalah pengkoordinasian dan pengelolaan sumberdaya sekolah yang direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara mandiri oleh sekolah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah dengan prinsip tertentu untuk meningkatkan mutu sekolah.

### **3. Prinsip MBS**

Sejalan dengan alasan tersebut, manajemen berbasis sekolah perlu dikelola dengan baik dengan berdasarkan pada prinsip yang kuat. Menurut Nurkholis dalam Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati (2020, hal. 199-200) ada 4 prinsip yang diterapkan dalam mengelola Manajemen berbasis Sekolah diantaranya:

#### **a. Prinsip *ekuifinalitas***

MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Artinya bahwa karena terdapat perbedaan antara kultur sekolah satu dengan

yang lain maka sekolah tidak dapat disamakan dengan sebuah standar yang paten.

b. Prinsip *desentralisasi*

Sekolah yang menerapkan MBS harus dapat menemukan masalah, dan memecahkannya dengan caranya sendiri.

c. Prinsip pengelolaan mandiri

Sekolah diberikan kewenangan untuk menagani masalah secara mandiri, dengan sistem pengelolaan mandiri dan dibawah kebijakan sendiri.

d. Prinsip inisiatif manusia

Potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian dikembangkan.

Melalui prinsip itulah dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan yang baik harus didukung oleh sumberdaya yang baik pula. SDM sebagai sumberdaya yang dapat dikembangkan memberikan peluang bagi sekolah untuk dapat mengmbangkan program sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek SDM. Demikian juaga dengan masyarakat dalam sekolah, potensi masyarakat yang ikut berperan dalam MBS dapat terus digalai dan dikembangkan untuk perkembangan sekolah.

#### **4. Tujuan MBS**

MBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan

sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah untuk mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. MBS bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama di daerah, karena sekolah dan masyarakat tidak perlu menunggu perintah dari pusat, tetapi dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan kondisi daerah dan melaksanakan visi pendidikan secara mandiri (Widyastuti, A., dkk., 2020, hal. 9).

Sagala (2011, hal. 157) menjelaskan bahwa tujuan diterapkannya MBS adalah untuk:

- a. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan penugasan staf,
- b. Meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan di sekolah,
- c. Munculnya gagasan baru dalam implementasi kurikulum, penggunaan teknologi pembelajaran, dan pemanfaatan sumber-sumber belajar,
- d. Meningkatnya mutu partisipasi masyarakat dan stakeholder. Oleh karena itu, MBS perlu diterapkan oleh setiap sekolah, karena sekolah lebih memahami hubungan-hubungan yang terdapat di lingkungan sekolah.

Menurut Engkoswara dan Komariah (2011, hal. 295), tujuan manajemen berbasis sekolah antara lain:

- a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia,
- b. Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan secara kooperatif,
- c. Meningkatkan tanggungjawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu pendidikan di sekolah,
- d. Meningkatkan kompetensi yang sehat antara sekolah untuk pencapaian mutu yang diharapkan.

## **B. Partisipasi Komite Sekolah**

### **1. Komite Sekolah**

- a. Pengertian Komite Sekolah

Pendidikan di sekolah seringkali menghadapi persoalan yang kompleks. Untuk melaksanakan program sekolah dengan baik maka perlu ada partisipasi aktif antara sekolah, orang tua murid, masyarakat, dan industri. Agar partisipasi dapat terkoordinasi dengan baik, maka dikordinasikan dalam satu wadah Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten dan Komite Sekolah di tingkat satuan pendidikan.

Menurut Kepmendiknas No.75 tahun 2016 tentang komite sekolah menjelaskan bahwa, komite sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas

sekolah ,serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Hal itu sesuai dengan pernyataan Djam'an Satori dalam Mulyono (2016, hal. 258), yang menyebutkan bahwa Komite Sekolah merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai forum resmi untuk mengakomodasikan dan membahas hal-hal yang menyangkut kepentingan kelembagaan sekolah. Komite sekolah bekerja secara mandiri tanpa ada hubungan hirarki dari pemerintah. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai tujuan sekolah secara bersama-sama dan mandiri dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

Komite Sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3). Secara umum kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Berdasarkan UU SISDIKNAS Tahun 2002, komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan internal sekolah maupun pendidikan di luar sekolah (Pohan, 2018, hal. 101).

Dalam undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 disebutkan Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga

mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite sekolah diharapkan dapat berkoordinasi dengan sekolah. Sehingga penyaluran aspirasi dari masyarakat, dapat direalisasikan dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa komite sekolah merupakan badan mandiri yang dibentuk di setiap satuan pendidikan untuk mengakomodasi kebutuhan sekolah dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah. Komite sekolah secara langsung tidak berhubungan dengan pemerintah, karena dibentuk sebagai representasi unsur masyarakat yang berperan dalam sekolah.

b. Tujuan Komite Sekolah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah N0.75 tahun 2016 pasal 3 ayat 1 bahwa komite sekolah berfungsi memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat baik perorangan/organisasi, dunia usaha/ dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan menindaklanjuti keluhan, saran,

kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat serta hasil pengamatan Komite Sekolah atas kinerja Sekolah.

Dalam Kepmendiknas No.44 tahun 2002, dijelaskan Komite Sekolah dibentuk bertujuan untuk:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah (Pohan, 2018, hal. 101) adalah sebagai berikut:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan

yang bermutu di satuan pendidikan

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah menurut Seriyanti dkk (2020, hal. 23-24) adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; dan menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan komite sekolah didirikan untuk meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Peningkatan mutu tersebut didapat melalui kerjasama antara sekolah, komite sekolah dan masyarakat dengan menciptakan kondisi kerja yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah.

c. Tugas dan Peran Komite Sekolah

Dalam Kemendiknas No.44 tahun 2002 disebutkan ada empat peran yang harus dilakukan komite sekolah dalam mengembangkan sekolah:

- 1) Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.

- 2) Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- 4) Mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan

Secara lebih terperinci, tugas komite sekolah juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2016 pasal 2 ayat 3. Bahwa komite sekolah harus dapat menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri, profesional dan akuntabel. Kemudian komite sekolah diharapkan dapat memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Djam'an satori dalam Mulyono (2016, hal. 258) menjelaskan tugas-tugas komite sekolah diantaranya:

- 1) Menyusun perencanaan strategi sekolah yaitu strategi pengembangan sekolah dalam perspektif 3-4 tahun mendatang. Diantaranya visi dan misi sekolah, analisis posisi untuk mengkaji kekuatan kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi, kajian isu-isu strategi sekolah perumusan program-

program, perumusan strategi pelaksanaan program, cara pengendalian dan evaluasinya.

- 2) Menyusun perencanaan tahunan sekolah, yang merupakan elaborasi dari perencanaan strategi sekolah. Dalam perencanaan tahunan ini yang dibahas adalah program-program operasional yang merupakan implementasi program prioritas yang dirumuskan dalam perencanaan strategi sekolah yang disertai perencanaan anggarannya.
- 3) Mengadakan pertemuan untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi, serta ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah. Hal-hal tersebut merupakan refleksi kepedulian para *stakeholder* sekolah terhadap berbagai aspek kehidupan sekolah yang ditujukan pada upaya-upaya perbaikan, kemajuan dan pengembangan sekolah.
- 4) Memikirkan upaya-upaya untuk memajukan sekolah, terutama yang menyangkut kelengkapan fasilitas sekolah, fasilitas pendidikan, pengedaan biaya pendidikan bagi pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif sekolah sesuai dengan aspirasi *stakeholder* sekolah. Perhatian terhadap masalah ini dimaksudkan agar sekolah setidaknya memenuhi standar pelayanan minimum.
- 5) Mendorong sekolah untuk melakukan internal monitoring

(*school self-assessment*) dan melaporkan hasilnya untuk dibahas dalam forum komite sekolah.

- 6) Membahas hasil-hasil tes standar yang dilakukan oleh lembaga/institusi eksternal dalam upaya menjaga jaminan mutu (*quality assurance*)serta memelihara kondisi pembelajaran sekolah sesuai dengan tuntutan standar minimum kompetensi siswa (*basic minimum competency*) seperti yang diatur dalam PP No.25 Tahun 2000.
- 7) Membahas laporan tahunan sekolah sehingga memperoleh penerimaan komite sekolah. Laporan tahunan sekolah tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten/Kota. Review sekolah merupakan kegiatan penting untuk mengetahui keunggulan suatu sekolah disertai analisis kondisi-kondisi pendukungnya, atau sebaliknya untuk mengetahui kelemahan-kelemahan sekolah disertai analisis faktor-faktor penyebabnya. Review sekolah merupakan media untuk saling mengisi pengalaman sekaligus saling belajar antar sekolah dalam upaya meningkatkan kinerjanya masing-masing.
- 8) Memantau kinerja sekolah, yang meliputi manajemen sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, mutu belajar-mengajar termasuk kinerja mengajar guru, hasil belajar siswa, disiplin dan tata terb sekolah, prestasi sekolah, baik dalam aspek intra maupun

ekstrakurikuler.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat dan peraturan mengenai tugas-tugas komite sekolah, dapat ditarik sebuah kesimpulan. Komite sekolah secara umum bertugas sebagai dewan pertimbangan, pendukung, pengawas, dan penghubung bagi satuan pendidikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

d. Pengorganisasian

1) Keanggotaan Komite Sekolah

Keanggotaan komite sekolah juga diatur dalam PP no 75 tahun 2016 pasal 3.

- a) Anggota komite sekolah/madrasah berjumlah paling banyak 5(lima) sampai 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur : orang tua murid (maks:50%), tokoh masyarakat (maks:30%), dan pakar pendidikan (maks:30%).
- b) Masa jabatan keanggotaan komite sekolah adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- c) Susunan anggota komite sekolah terdiri atas ketua komite dan sekretaris.
- d) Anggota komite sekolah dipilih oleh rapat orang tua peserta didik satuan pendidikan.
- e) Ketua komite dan sekretaris dipilih dari dan oleh anggota

secara mufakat atau pemungutan suara.

f) Ketua, sekretaris dan anggota ditetapkan oleh kepala sekolah.

## 2) Kepengurusan Komite Sekolah

Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara. Pengurus dipilih oleh anggota. Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.

## 3) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)

a) Komite sekolah wajib memiliki AD dan ART.

b) Anggaran Dasar setidaknya memuat: (1) Nama dan tempat kedudukan; (2) Dasar, tujuan dan kegiatan; (3) Keanggotaan dan kepengurusan; (4) Hak dan kewajiban anggota dan pengurus; (5) Keuangan; (6) Mekanisme kerja dan rapat-rapat; (7) Perubahan AD dan ART serta pembubaran organisasi.

c) Pendanaan komite sekolah/madrasah dapat bersumber dari (PP No.17 Tahun 2010 pasal 196 ayat 7): (1) Pemerintah; (2) Pemerintah daerah; (3) Masyarakat; (4) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; (5) Sumber lain yang sah.

## e. Indikator Kinerja Komite Sekolah

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengembangkan sekolah. Potensi yang masih dapat terus dikembangkan dari

masingmasing individu dapat meningkatkan peluang pengembangan sekolah. Melalui komite sekolah, masyarakat dituntut agar dapat bekerjasama dengan sesama elemen masyarakat dan sekolah sehingga dapat melakukan peningkatan mutu sekolah sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.

Untuk mencapai fungsi-fungsi yang telah ditetapkan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh komite sekolah. Dalam Kepmendiknas No.44 tahun 2002, dijelaskan beberapa fungsi yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan komite sekolah antara lain:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 2) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/dunia usaha/ dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- 3) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- 4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
  - a) Kebijakan dan program pendidikan;
  - b) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS);
  - c) Kriteria kinerja satuan pendidikan;

- d) Kriteria tenaga kependidikan;
  - e) Kriteria fasilitas pendidikan; dan
  - f) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
  - g) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- 5) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan;
- 6) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

## **2. Partisipasi Komite Sekolah**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Secara etimologi kata partisipasi, menurut Soerjono Soekanto (2012, hal. 425) adalah dari bahasa latin *parti cipatio* yang merupakan bagian dari dua kata paga yang artinya bagian dan *capare* yang artinya mengambil. Kata participatio itu sendiri merupakan perkembangan dari parti pare yang kemudian dibedakan menjadi participelo yang berarti mengambil bagian atau ikut serta.

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene (2011, hal. 30), partisipasi adalah keteterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental

dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Sedangkan menurut Siti Irene (2011, hal. 50) sendiri, partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Dari penjelasan diatas partisipasi berbeda dengan membantu, dan bekerja sama. Dalam membantu ada unsur hanya memberi tetapi secara emosional dan fisik orang tersebut tidak memberikan perannya. Sedangkan bekerja sama berarti ada unsur timbal balik untuk mencapai keuntungan masing-masing pihak jadi orang yang bekerja sama dia bekerja untuk tujuannya sendiri tidak berperan dalam mencapai tujuan kegiatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan bentuk keikutsertaan seseorang secara fisik dan emosionalnya dengan dilandasi rasa tanggung jawab. Dengan adanya partisipasi diharapkan mampu mencapai tujuan. Partisipasi masyarakat di dalam sekolah berarti keikutsertaan sejumlah masyarakat yang tergabung dalam organisasi sekolah untuk mendukung kegiatan sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah.

b. Bentuk Partisipasi

Partisipasi dapat dibagi dalam berbagai bentuk. Partisipasi menurut Effendi dalam Siti Irene A.D. (2011, hal. 58) terbagi atas partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien. Adapun dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Untuk mewujudkan partisipasi tersebut, maka diperlukan ketelibatan peserta didik dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Selain itu, peserta didik juga harus dapat merespon dan berkresasi dalam kegiatan yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar.

Menurut Cohen dan Uphoff (Irene, 2011, hal. 61) menjelaskan bahwa partisipasi dibedakan terbagi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan gagasan dan ide yang menyangkut kepentingan bersama. Dalam partisipasi ini masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan orientasi pembangunan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi: menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan, administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan program yang telah dicapai secara kuantitas dan kualitas. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini terkait dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa Partisipasi uang, Partisipasi harta benda, Partisipasi tenaga, Partisipasi ketrampilan, Partisipasi Sosial. Sedangkan bentuk partisipasi tersebut dapat diterapkan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi program.

## **C. Mutu Pendidikan**

### **1. Pengertian Mutu Pendidikan**

Menurut Jerry H. Makawimbang (2011, hal. 46) mutu merupakan hasil terbaik yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang

terhadap apa yang dilakukan sehingga mampu memberikan kenyamanan, kesejahteraan, dan tidak menerima keluhan dari pelanggan.

Edwards Sallis (2015, hal. 42-47) mengemukakan bahwa ada dua konsep tentang mutu:

a. Konsep Absolut

Dalam pengertian absolut, mutu atau kualitas identik dengan sifat kebaikan, keindahan, kebenaran, yakni sesuatu yang ideal dalam pengertian ini, sesuatu yang berkualitas adalah sesuatu yang memenuhi standar tertinggi yang tidak ada bandingnya.

b. Konsep Relatif

Menurut konsep ini mutu bukan suatu atribut sesuatu dalam produk atau jasa. Tetapi apa yang dipersyaratkan terhadap sesuatu, sesuatu dianggap bermutu apabila memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ada dua aspek dalam penilaian definisi relatif. Pertama menentukan spesifikasi/persyaratan yang dibutuhkan. Kedua, cocok dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, mutu adalah kualitas yang dihasilkan dari sebuah produk dengan mencapai sebuah standar atau spesifikasi yang telah ditetapkan dengan penilaian dari *input*, proses dan *output*. Dalam tingkat satuan pendidikan produk disini adalah siswa, dimana siswa yang memiliki mutu berarti telah mencapai kompetensi sesuai standar yang telah ditentukan.

Menurut Sagala (2011, hal. 170) mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup *input*, proses, dan *output* pendidikan.

Mutu pendidikan menurut Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati (2020, hal. 210) adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup *input*, proses, dan uotput pendidikan.

Menurut Rohiat dalam Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati (2020, hal. 210-211), *input* pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses berupa sumber daya, perangkat lunak, dan harapan. Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain, berupa proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan program, proses pembelajaran, proses monitoring, dan evaluasi. *Output* pendidikan merupakan kinerja sekolah.

Menurut Mujamil Qomar) (2010, hal. 206) mutu pendidikan adalah “Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin”.

Menurut Rusman (2011, hal. 555), antara proses dan hasil

pendidikan yang bermutu saling berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka mutu dalam dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai setiap tahun atau kurun waktu lainnya.

Dari deskripsi di atas dapatlah dipahami bahwa mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan dalam upaya mengubah tingkah laku anak didik untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa seoptimal mungkin sehingga mencapai sasaran yang diharapkan.

## **2. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan**

Menurut Sagala (2011, hal. 170) peningkatan mutu pendidikan di sekolah diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk memberi dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh dalam mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman dan peningkatan mutu pendidikan yang beorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandaskan luas, nyata, dan bermakna.

Menurut Davis dan Thomas dalam Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati (2020, hal. 214), terdapat delapan kategori yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah dalam mengembangkan orientasi akademis dan nonakademis, yaitu:

a. Kepala sekolah dapat memainkan peran aktif dalam meningkatkan

kesadaran perlunya perbaikan sekolah, harapan prestasi yang lebih tinggi dan pencapaian konsensus untuk perubahan tersebut.

- b. Kepala sekolah dapat aktif dalam penciptaan perbaikan yang konkrit itu sendiri.
- c. Kepala sekolah dapat menciptakan sistem hadiah untuk peserta didik dan guru yang mendukung orientasi akademis dan merangsang keunggulan dalam penampilan peserta didik dan guru.
- d. Tingkah laku sentral kepala sekolah yang efektif adalah dengan monitoring perkembangan peserta didik, khususnya seperti tercermin dalam nilai tes tiap tingkatan, tiap kelas, dan tiap peserta didik.
- e. Kepala sekolah dapat memperoleh sumber-sumber material dan personal yang diperlukan dalam pengajaran yang efektif dan menggunakannya secara kreatif sesuai dengan prioritas akademis.
- f. Kepala sekolah bertanggungjawab terhadap penciptaan lingkungan yang tertip dan aman.
- g. Kepala sekolah monitor faktor lain yang berkaitan dengan hasil belajar, faktor yang terkait dengan perbaikan yang secara implisit menekankan suasana/budaya akademik.
- h. Fungsi utama kepala sekolah yang efektif adalah mengamati guru dalam kelas dan merundingkan dengan mereka tentang cara menangani masalah dan perbaikan pengajaran.

Agar peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan/sekolah

dapat tercapai maka menurut Hasnun dalam Hendro Widodo dan Etyk Nurhayati (2020, hal. 216), kepala sekolah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Rencana visi misi dan tujuan sekolah dengan baik.
- b. Susun program sekolah yang terukur sesuai dengan kondisi sekolah dan masyarakat.
- c. Sekolah membuat program harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan tetapkan siapa yang melakukannya.
- d. Wakil kepala sekolah, guru, guru pembina, dan guru bimbingan, bekerja sesuai dengan tugas dan program yang dibuat.
- e. Semua guru dilibatkan dan dimotivasi untuk berfikir kreatif dan melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran.
- f. Bangun kerjasama dengan harmonis dengan orangtua peserta didik, masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh dukungan dana.
- g. Lakukan supervisi kelas secara periodik.
- h. Adakna kegiatan KKG, MGMP, workshop, diskusi, seminar kelas, dan kegiatan ilmiah dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
- i. Ciptakan keharmonisan, kekeluargaan, kenyamanan, dan keamanan di sekolah.
- j. Hindari guru membuat kelompok tertentu, sifat apriori, dan menunggu perintah.

k. Lakukan evaluasi penilaian program, tindak lanjut, perbaikan, dan pengayaan.

### **3. Indikator Keberhasilan Mutu Pendidikan**

Melalui penerapan prinsip-prinsip mutu diatas, diharapkan akan menjadikan kualitas sekolah menjadi lebih baik. Dalam sebuah penerapan program sekolah, keberhasilan yang dicapai ditandai dengan terwujudnya tujuan dan visi misi sekolah. Terwujudnya visi misi dan tujuan sekolah menunjukkan peningkatan mutu penyelenggaraan sekolah. Pelayanan dan prestasi yang lebih baik di sekolah menjadi indikasi adanya perbaikan mutu di sekolah.

Berbicara tentang mutu pendidikan berarti mengkaji keseluruhan dimensi pendidikan yang satu dengan yang lain saling terkait. Selain itu menentukan karakteristik atau ukuran untuk menunjukkan kualitas pendidikan sangat rumit, namun demikian beberapa indikator dapat digunakan sebagai rambu-rambu antara lain: prestasi belajar siswa, sarana dan prasarana yang mendukung, kualitas pengajar dan manajemen sekolah.

Menurut Towsend dan Butterworth (1992) yang dikutip Jerry H. Makawimbang (2011, hal. 51) dikemukakan bahwa, ada sepuluh faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yakni : a) Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. b) Partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf. c) Proses belajar-mengajar yang efektif. d)

Pengembangan staf yang terprogram e) Kurikulum yang relevan. f) Memiliki visi dan misi yang jelas. g) Iklim sekolah yang kondusif. h) Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. i) Komunikasi yang efektif baik internal maupun eksternal. j) Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intristik.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang memiliki tingkatan mutu telah ditentukan melalui standar mutu. Sekolah yang bermutu berarti telah memberikan jaminan mutu dengan standar yang telah diatur. Dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, standar mutu pendidikan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Standar Nasional Pendidikan, ada 8 aspek yang diukur yaitu :

a. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan diatur dalam Permendikbud No. 20 tahun 2016.

b. Standar Isi

Standar isi diatur dalam Permendikbud No. 21 Tahun 2016.

c. Standar Proses

Standar Proses diatur dalam Permendikbud No. 22 Tahun 2016.

d. Standar Pendidik dan tenaga Kependidikan

Standar pendidik dan tenaga kependidikan diatur dalam beberapa peraturan menteri. Diantaranya adalah Kualifikasi minimal

Pengawas Sekolah/Madrasah diatur dalam Permendiknas No.12 Tahun 2007. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 mengenai standar Kepala Sekolah. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru diatur dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007. Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah. Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah. Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.

e. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan diatur dalam Permendiknas No.19 Tahun 2007.

f. Standar Sarana Prasarana

Standar sarana dan prasarana diatur dalam Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA). Permendiknas No. 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Permendiknas No. 40 Tahun 2008 tentang Sarana dan Prasarana

SMK.

g. Standar Pembiayaan

Standar pembiayaan diatur dalam Permendiknas No.69 Tahun 2009.

h. Standar Penilaian

i. Pendidikan Standar Penilaian Pendidikan diatur dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016.

Berdasarkan pendapat ahli dan peraturan mengenai standar pendidikan, dapat ditarik kesimpulan mengenai indikator keberhasilan mutu dalam sekolah adalah telah tercapainya kualifikasi komponen-komponen di dalam sekolah sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dengan kerjasama dan saling support dari masing-masing komponen sekolah.

#### **D. Kajian Penelitian yang Relevan**

Adapun beberapa kajian literatur yang menjadi rujukan oleh penulis adalah hasil penelitian Muhamad Churdaini (2020) yang berjudul *“Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo”*. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa Otonomi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 17 Purworejo sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Partisipasi sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 17 Purworejo yaitu dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah terkait. Partisipasi dilakukan dalam kegiatan perencanaan, penetapan kebijakan,

maupun dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 17 Purworejo berjalan dengan baik. Kepala sekolah mampu melaksanakan perannya sebagai leader dan manajer secara seimbang. Kerja tim sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP N 17 Purworejo yaitu dilakukan dengan kekompakan dan kebersamaan yang kuat, sehingga mampu mengatasi persoalan secara optimal.

Selanjutnya studi kasus yang ditulis oleh Khoiri (2020) yang berjudul “*Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SDN Patuk I Kabupaten Gunungkidul)*” yang dalam pembahasannya bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah berupa partisipasi berbentuk finansial/ material bagi masyarakat atau orangtua yang memiliki anak sekolah di SDN Patuk I, partisipasi berbentuk ide-ide atau gagasan pemikiran bagi masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan dan memegang kebijakan di Patuk dan partisipasi berbentuk doa bagi masyarakat dan orang tua siswa SDN Patuk I yang memiliki kepedulian secara moral terhadap SDN Patuk I.

Karya ilmiah lain tentang Komite Sekolah yang penulis jadikan rujukan dalam melakukan penelitian ini yaitu, penelitian yang ditulis oleh Tutik Rusmawati (2020) yang berjudul “*Partisipasi Masyarakat dan Komite dalam Pengembangan Pendidikan, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah*”, pada penelitian tersebut menekankan kajiannya tentang

masalah partisipasi komite sekolah, khususnya dalam peningkatan mutu pendidikan secara umum. Partisipasi komite seiring dengan desentralisasi pendidikan kepada sekolah, sekolah diberi keleluasaan untuk mengatur dan merencanakan program serta pelaksanaan dalam hal peningkatan mutu pendidikan, maka dirancanglah Manajemen Berbasis Sekolah, yang memaksimalkan sinergitas antara kepala sekolah, guru, siswa, orangtua/komite dan masyarakat.

Penelitian yang ditulis oleh Karseno Handoyo, Mudhofir, dan Maslama (2021) yang berjudul *Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Madrasah*. Konsep Implementasi Manajemen Syariah Berbasis Sekolah (MBS) yang diterapkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Sukoharjo dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Sukoharjo sudah cukup baik. Beberapa komponen yang ada dalam konsep MBS sudah dapat dilaksanakan dengan baik, seperti Kepemimpinan Kepala Sekolah yang demokratis, Kepala Sekolah telah mampu menjalankan peran sebagai pendidik, manajer, pemimpin, administrator, supervisor, inovator dan motivator dengan baik. Selain itu peran aktif masyarakat juga telah nampak hal tersebut dapat dilihat dengan bantuan yang diberikan kepada MIN 2 Sukoharjo dan MIN 4 Sukoharjo baik materiil maupun non materiil. Juga peran serta guru yang secara berrsama-sama terus meningkatkan kualitasnya dengan berbagai macam kegiatan. Strategi-Strategi Implementasi yann dibuat Madarasah Ibtidaiyah Negeri 2 dan 4 sukoharjo yang, juga cukup efektif

misalnya dalam meningkatkan pengembangan mutu siswa di Madrasah, Strategi peningkatan kualitas siswa dengan berlandaskan nilai-nilai agama.

Penelitian selanjutnya oleh Iis Suharti (2021). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tiga MAN Model yang berada di Provinsi Jawa Barat penulis menemukan adanya perwujudan peran Komite Madrasah dalam memberi pertimbangan terhadap penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Terdapat adanya dukungan pemikiran, finansial, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Penulis juga telah memperoleh data dan informasi tentang peran Komite Madrasah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat, penulis menyimpulkan belum semaksimal yang penulis harapkan. Hasil kemitraan yang ada belum mampu mendorong tercapainya partisipasi masyarakat. Pada umumnya Komite Madrasah belum menjadi kekuatan yang signifikan terhadap implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat sehingga belum sepenuhnya dapat mendukung terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.

Dari beberapa penelitian yang dilakukan di atas, maka terdapat perbedaan antara tesis yang akan peneliti tulis dengan karya ilmiah di atas. Penelitian di atas hanya membahas tentang peran dan fungsi Komite Sekolah bagi kehidupan maupun pengembangan satuan pendidikan. Sedangkan tesis yang akan peneliti tulis membahas tentang bagaimana implementasi dari

MBS ditunjang dengan pengelolaan atau manajemen Komite Sekolah untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi secara optimal agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai yaitu membantu Satuan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang bukan hanya dari prestasi akademis dan non akademis tetapi bagaimana sekolah dapat memberikan pembiasaan nilai-nilai islami dengan menekankan akhlaqul karimah bagi siswa-siswi SDN 1 Jampiroso.

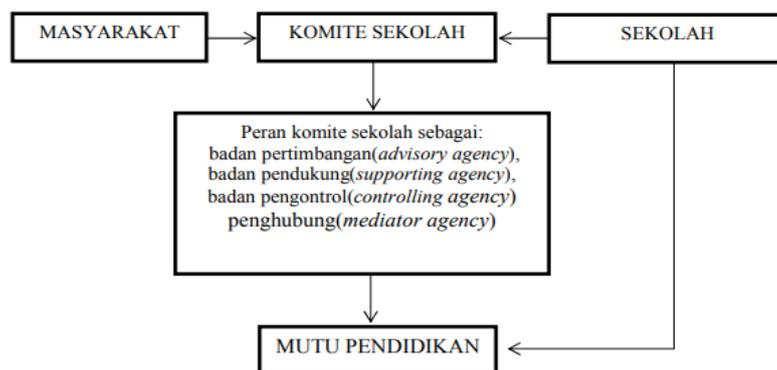
#### **E. Alur Pikir**

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang berperan langsung dalam rangka mencerdaskan bangsa. Agar pelayanan sekolah dapat terlaksana dengan baik maka dibutuhkan pengelolaan sekolah yang baik. Salah satu pengelolaan yang diterapkan adalah Manajemen Berbasis Sekolah. Manajemen Berbasis Sekolah dilaksanakan di satuan pendidikan/sekolah dengan harapan sekolah dapat mengembangkan fungsi manajerial dalam sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan dengan cara sekolah itu sendiri.

Untuk meningkatkan perkembangan dan mutu sekolah, maka diperlukan peran banyak pihak dalam membantu mempercepat pengembangan mutu sekolah. Salah satu upaya sekolah adalah dengan cara mengoptimalkan peran masyarakat. Sebagai konsumen pendidikan, masyarakat perlu dilibatkan dalam manajemen sekolah agar masyarakat sadar terhadap pendidikan sehingga masyarakat tidak sungkan untuk membantu

sekolah. Sebagai upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan, maka dibentuk komite sekolah.

Komite sekolah dibentuk untuk membantu sekolah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Untuk mempermudah bentuk kerja dari komite sekolah, ada beberapa peran komite sekolah yang dapat dilakukan yaitu peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), peran komite sekolah sebagai badan pendukung (*supporting agency*), peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dan peran komite sebagai badan penghubung (*mediator agency*). Dengan mengoptimalkan peran komite sekolah, diharapkan dapat meningkatkan mutu sekolah terutama dalam mutu pelayanan dan output sekolah. Secara skematis kerangka berpikir dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian  
(Sumber:Penulis)

## F. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitiannya ialah:

1. Bagaimana implementasi *School Based Management* di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan (*Advisory Agent*) dalam implementasi *School Based Management* dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?
3. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan pendukung (*Support Agent*) dalam implementasi *School Based Management* dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?
4. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan pengawas (*Control Agent*) dalam implementasi *School Based Management* dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?
5. Bagaimana partisipasi komite sekolah sebagai badan penghubung (*Mediator Agent*) dalam implementasi *School Based Management* dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?
6. Apa saja kendala implementasi implementasi *School Based Management* dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala dan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif yang menggambarkan keadaan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah di sekolah SDN 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Setting dan lokasi penelitian ini berada di SDN 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung dan direncanakan dilaksanakan selama tiga bulan. Alasannya, karena SDN 1 Jampiroso merupakan salah satu sekolah dasar yang mulai merintis penerapan *School Based Management*/Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Lokasi ini penulis pilih sebagai obyek penelitian, karena penulis merasa tertarik dengan masalah penerapan MBS (Manajemen Berbasis sekolah) di Sekolah Dasar Negeri sehingga mendorong penulis ingin mengetahui/melihat bagaimana Implementasi MBS (Manajemen Berbasis

sekolah) untuk masa depan pendidikan yang lebih efektif, sehingga paling tidak ini merupakan penambahan cakrawala pengetahuan kita dalam dunia Pendidikan.

## **2. Waktu Penelitian**

Penelitian direncanakan mulai dilaksanakan pada bulan November 2021 selama dua bulan.

## **C. Sumber Data**

Data penelitian terdiri atas tiga jenis, yaitu (a) data hasil observasi, (b) data transkripsi wawancara, dan (c) data dokumentasi. Data hasil observasi bersumber dari kepala komite dan seluruh anggota komite sekolah di SDN 1 Jampiroso. Data transkripsi wawancara bersumber dari hasil wawancara dengan informan/subjek penelitian (kepala sekolah dan guru) berkaitan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Data dokumen bersumber dari tulisan berkaitan dengan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Sedangkan untuk mutu pendidikan, peneliti mengadakan wawancara dengan siswa dan orang tua sebagai salah satu stakeholder dalam sekolah ini.

## **D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

### **1. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam penelitian, karena data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisis penelitian. Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dipecahkan. Teknik pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, dan dokumentasi terhadap subjek penelitian. Ketiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan berikut ini.

a. Teknik Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan kepada anggota komite dengan indikator yang sudah ditentukan. Observasi digunakan untuk mengetahui peran serta komite sekolah dalam penerapan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Instrumen observasi ini diberikan kepada kepala Komite dan seluruh anggota komite sekolah di SD Negeri 1 Jampiroso. Observasi ini digunakan sebagai instrumen utama untuk memperoleh data partisipasi komite sekolah dalam peningkatan mutu Manajemen Berbasis Sekolah.

b. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2011, hal. 135). Percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada kepala sekolah dan guru untuk mengungkap seputar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah. Wawancara dilakukan untuk

memperoleh data mengenai peran komite sekolah menurut pandangan responden. Selain itu, untuk memperoleh penjelasan dari indikator yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan setelah ada kesepakatan waktu wawancara sehingga tidak mengganggu responden. Teknik ini juga untuk mengkonfirmasi tentang data yang diperoleh dari hasil observasi.

c. Teknik dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi berupa buku, dokumen, foto, dan data relevan lainnya. Pengambilan data dokumentasi dilakukan untuk mengambil data yang bisa menguatkan hasil observasi dan hasil wawancara. Selain itu juga sebagai bahan pertimbangan yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga peneliti menyusun pedoman dokumentasi secara sistematis sesuai dengan instrumen observasi. Menurut Moleong (2011, hal. 217) dokumen telah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen dapat dimanfaatkan juga untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Dalam penelitian ini dokumen sebagai penguji dan penguat data dari kuesioner. Dengan penyusunan sistematis dari kuesioner, data kuesioner akan didukung dengan data dokumentasi.

## 2. Instrumen Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, baik dengan teknik observasi, teknik wawancara, maupun teknik dokumentasi, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dengan dilengkapi kisi pengembangan instrumen berupa panduan observasi, panduan wawancara dan panduan dokumentasi. Berikut disajikan kisi-kisi pengembangan instrumen penelitian dan uji instrumen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen

No	Indikator	Aspek Indikator	Jenis Instrumen
1.	(Implementasi MBS) Akuntabilitas, Partisipasi, Kredibilitas,transparansi	Menyusun dan melaporkan Rencana pelaksanaan programbeserta anggarannya Melibatkan warga sekolah dalam program sekolah	Observasi Wawancara Dokumentasi
2.	(Partisipasi Komite) Badan Petimbangan Sekolah	Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai : (1) kebijakan dan program pendidikan, (2) RAPBS, (3) Kriteria kinerja satuan, (4) kriteria tenaga kependidikan, (5) kriteria Fasilitas Pendidikan, dan (6)	Observasi Wawancara Dokumentasi

No	Indikator	Aspek Indikator	Jenis Instrumen
		hal-hal terkait pendidikan	
	Badan Pendukung Sekolah	Mendorong orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	Observasi Wawancara Dokumentasi
		Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan	Observasi Wawancara Dokumentasi
		Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masaayarakat terhadap peyelenggaraan pendidikan yang bermutu	Kuesioner Dokumentasi
	Badan Pengontrol Sekolah	Melakukan evaluasi dan pengawasa kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan	Observasi Wawancara Dokumentasi
	Badan Penghubung Sekolah	Melakukan kerjasama dengan Masyarakat	Observasi Wawancara Dokumentasi
		Menampung dan menganalisis masukan dari masyarakat	Observasi Wawancara Dokumentasi
3.	(Peningkatan Mutu) Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik, Pengelolaan Lembaga, Bimbingan dan konseling	Kondisi Sarpras sekolah Pembiasaan islami di sekolah Metode Pembelajaran oleh guru Metode penilaian	Observasi Wawancara Dokumentasi

No	Indikator	Aspek Indikator	Jenis Instrumen
		Pelayanan kepada siswa Apresiasi dan motivasi yang dilakukan	

#### E. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat kepercayaan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Triangulasi data dilakukan dengan cross check, yaitu dengan cara data observasi yang diperoleh dipadukan dengan data wawancara atau data dokumentasi. Dengan membandingkan dan memadukan hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut, maka peneliti yakin dengan kepercayaan data yang dikumpulkan.

Metode Triangulasi yang digunakan merupakan triangulasi antar-metode dimana beberapa metode yang berbeda digunakan dalam kaitan dengan objek studi yang sama, masalah substansif yang sama dan lain-lain. Dalam penelitian yang telah dilakukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan gambaran mengenai partisipasi masyarakat dalam hal ini komite sekolah dalam Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah terhadap peningkatan mutu sekolah di SDN 1 Jampiroso.

## **F. Analisis Data**

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, mentabulasi, dan menyajikan data dari variabel yang diteliti. Data disusun agar dapat ditafsirkan sehingga lebih mudah untuk dimengerti orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mana bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai partisipasi komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sebagai penerapan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN 1 Jampiroso.

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah pengolahan dan analisa data. Menurut Suliswiyadi di (Suliswiyadi, 2015, hal. 149), Proses analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan selama di lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa,menyusun ke dalam pola, dan memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri atau orang lain.

Analisis pada penelitian ini yang bersifat kualitatif, maka untuk analisis data selama di lapangan peneliti menggunakan model *spradley*, yaitu suatu tehnik analisa data yang disesuaikan dengan tahapan dalam penelitian, yaitu:

1. Tenik pengumpulan data dalam implementasi Manajemen Berbasis

Sekolah terhadap peningkatan mutu di SD Negeri 1 Jampiroso dengan memilih situasi sosial seperti lokasi, pelaku, dan aktivitas yang akan dilakukan.

2. Setelah di lapangan dimulai dengan menetapkan siapa saja yang akan menjadi informan yang dapat memberikan informasi. Setelah itu peneliti melakukan wawancara dan mencatat hasil wawancara. Kemudian peneliti memperhatikan obyek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dilanjutkan dengan menganalisis terhadap hasil wawancara. Berdasarkan hasil dari analisis wawancara selanjutnya melakukan analisis domain.
3. Melakukan observasi terfokus dengan analisa taksonomi dilanjutkan peneliti mulai mengadakan analisis komponensial. Hasil dari analisis komponensial dianalisis menggunakan analisis tema sehingga di dapatkan tema-tema, hasil ini selanjutnya dituliskan sebagai laporan kualitatif.
4. Keabsahan data merupakan faktor penting yang diperbarui oleh *validitas* dan *reliabilitas* dan derajat keabsahan data (*kredibilitas*) yang dapat di cek dengan teknik *triangulasi*

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam Tesis yang berjudul “Implementasi *School Based Management* di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi *School Based Management* di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung sesuai dengan prinsip-prinsip *School Based Management* yaitu :

Prinsip pertama yaitu prinsip Ekuifinalitas yaitu prinsip teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas dalam mengelola sekolah. Prinsip kedua yaitu prinsip Desentralisasi yaitu suatu prinsip yang didasarkan bahwa setiap aktivitas tidak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan sehingga dibutuhkan strategi dalam mengatasi permasalahan. Prinsip ketiga yaitu prinsip prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri yaitu sekolah memiliki otonomi tertentu untuk mengembangkan tujuan, strategi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Prinsip keempat adalah prinsip Inisiatif Manusia, prinsip ini menekankan kepada pemanfaatan dan pengembangan terhadap kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki. Segala ide-ide, pemikiran baik dari pihak sekolah maupun orang tua dapat diwujudkan melalui diskusi dan program kegiatan sekolah.

2. Partisipasi komite sekolah sebagai badan pertimbangan, badan pendukung, badan pengawas, badan penghubung dalam implementasi *School Based Management* dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung berjalan sesuai fungsinya. Tingkat partisipasi anggota Komite sekolah dalam memberikan pertimbangan pada saat penyusunan RKAS SD Negeri 1 Jampiroso. Tingkat Partisipasi anggota komite sekolah sebagai badan pertimbangan dalam pendataan Sumber Daya Sekolah SD Negeri 1 Jampiroso dalam. Kegiatan pendataan berkaitan dengan sumberdaya dari masyarakat terhadap kondisi sosial ekonomi orang tua murid dan memberikan masukan atau rekomendasi bagi orang tua murid. Kegiatan yang cukup membuktikan terlaksananya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah, adalah dengan adanya Taman Pendidikan Qur'an dimana komite tidak hanya memberikan himbauan kepada masyarakat tetapi turun langsung menjadi narasumber. Tingkat partisipasi anggota komite sekolah sebagai badan pengontrol dalam memantau pelaksanaan program SD Negeri 1 Jampiroso belum dapat berjalan secara maksimal. Kegiatan yang bersifat pemantauan kegiatan diantaranya mengadakan rapat rutin antara komite, sekolah dan dewan pendidikan, pemberian apresiasi dan masukan terhadap program sekolah, silaturahmi ke sekolah. Tingkat partisipasi anggota Komite Sekolah sebagai badan penghubung dalam rangka melakukan kerjasama dengan

masyarakat mencapai kategori pencapaian berhasil. Kegiatan yang berkaitan dengan indikator adalah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan rapat, dan memberikan himbauan serta menjalin komunikasi dengan masyarakat. melakukan kerjasama dan menghasilkan MOU atau kontrak kerjasama antara sekolah dengan Lembaga lain seperti puskesmas, kepolisian, perpustakaan dan lembaga-lembaga lain yang mendukung Pendidikan.

3. Kendala implementasi implementasi *School Based Management* dan partisipasi komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Jampiroso Kabupaten Temanggung dapat teratasi dengan baik. Waktu menjadi kendala utama bagi anggota komite sekolah dalam upaya meningkatkan mutu sekolah. Untuk kegiatan anggota komite di luar unsur sekolah ada yang menjadi guru, pengusaha, pemerintah desa, dan pensiunan. Karena kegiatan yang berbeda- beda sehingga waktunya tidak dapat di sesuaikan. Namun selama ini belum ada perhatian khusus dari pemerintah. Untuk mengembangkan mutu pendidikan Dalam hal ini komite sekolah khususnya menjembatani dalam penarikan dana sumbangan sekolah. Komite sekolah memastikan orangtua murid tidak keberatan dalam pembayaran uang sumbangan sekolah, juga mendorong dan menghimbau masyarakat untuk konsekuen dan berkomitmen dalam menjalankan tugasnya.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas dapat diambil saran yaitu, untuk peningkatan mutu sekolah disarankan memberikan perhatian khusus dalam hal ini :

- 1) Melakukan *upgrade* terhadap kemampuan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
- 2) Memberikan apresiasi bagi guru yang telah menunjukkan kinerja dalam melaksanakan tugasnya,
- 3) Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga akan menjadi faktor pendorong yang positif bagi peningkatan mutu sekolah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achadah, A. (2019). Manajemen berbasis sekolah (MBS): Konsep Dasar dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 4(2), 77-88.
- Churdaini, M. (2020). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 17 Purworejo. *Cakrawala: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam dan studi sosial*, 4(1), 21-23.
- Handoyo, K., Mudhofir, M., & Maslamah, M. (2021). Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 321-332.
- Pohan, M. M. (2018). Peran Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*, 2(2), 97-106.
- Rusmawati, T. (2020). Partisipasi Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SDN Patuk I Kabupaten Gunungkidul). *In Seminar Nasional Pendidikan*, 1(1).
- Rusmawati, T. (2020). Partisipasi Masyarakat dan Komite dalam Pengembangan Pendidikan, Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. *Cendekia Sambas*, 1(1), 15-20.
- Seriyanti, N., Ahmad, S., & Destiniar, D. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Peran Komite Sekolah Terhadap Keberhasilan Manajemen Berbasis Sekolah. *JMKSP (Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan)*, 6(1), 15-33.
- Susan, E. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 952-962.
- Sari, W., & Marlina, M. (2012). Penerapan Fungsi Manajemen dalam Pengelolaan Perpustakaan di SMK Tamansiswa Padang. *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan*, 1(1), 39-48.
- Suharti, I. (2021). Aktualisasi Peran Dan Fungsi Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Sebagai Implementasi Manajemen Berbasis

- Sekolah. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 1(1), 153-169.
- Engkoswara & Komariah. (2011). *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Hasbullah. (2015). *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Irene, S. A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- L.Febriana;M.Isnaini. (2019). Peranan Komite Sekolah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang. *Raden Patah*.
- Makawimbang, J. H. (2011). *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyono. (2016). *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Qomar, M. (2010). *Manajemen Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Rusman. (2011). *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Raja Wali Pers.
- Sagala, S. (2011). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Potensi Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah*. Bandung: Alfabeta.
- Saihu, M. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah, Madrasah, dan Pesantren*. Tangerang Selatan: Yapin An-Namiyah.
- Sallis, E. (2015). *Total Quality Management In Education*. Yogyakarta: iRsoSS (Terjemahan).
- Sanusi, A. (2010). *Balanced Score Card, Suatu Pendekatan dalam Impelementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Solihin, I. (2012). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Suliswiyadi. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Sigma.
- Widodo, Hendro & Nurhayati, Etyk. (2020). *Manajemen Pendidikan Sekolah, Madrasah, dan Pesantren*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Widyastuti, A., dkk. (2020). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Perencanaan*. Yayasan Kita Menulis.